



# **RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2024**



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 188.44/256/2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
  - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
  - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
  - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
  - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Setda Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 18 Juli 2024

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:  
Up. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:  
Up. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;  
c. Asisten Administrasi Umum; dan  
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Palangka Raya, 4 Juli 2024



BARU, S.Pd., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700228 199803 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..</b>	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	31
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	31
3.3 Program dan Kegiatan .....	34
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	51

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam peraturan dimaksud diamanatkan bahwa Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun untuk periode Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, sehingga penyusunan Renja PD dilakukan secara silmutan/paralel dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah disusun agar dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama dalam tahun anggaran 2025 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian akan dapat memberikan gambaran tentang arah dan tujuan program, target kinerja yang akan dicapai serta kegiatan pelayanan sosial yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja PD merupakan proses awal dari penyusunan perencanaan program dan anggaran PD yang akan terkait dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, sehingga program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renja PD akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD Tahun 2025.

#### 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kalimantan Tengah;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
  25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Penyusunan Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Tahun Anggaran 2025, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.

#### 2. Tujuan

- a. Memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025.
- b. Merencanakan target dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini, disusun terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN**, terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran Renja PD.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, memuat uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dana dari program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan.

**BAB V PENUTUP** memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran.

## BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Pada Tahun Anggaran 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengelola anggaran sebesar **Rp. 24.466.862.497,-** (Dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 23.349.691.297,-** (Dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan Belanja Modal **Rp. 1.117.171.200,-** (Satu milyar seratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Adapun tingkat Capaian dan Realisasi anggaran dimaksud adalah sebagai berikut :

## Dana APBD Provinsi

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.480.862.497	21.767.802.247	92,93	100,00
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	259.207.001	258.348.488	99,67	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.828.001	60.508.120	99,47	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000	19.910.750	99,55	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.125.000	15.043.100	99,46	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	19.945.770	99,73	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.537.000	18.533.770	99,98	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	74.717.000	74.670.926	99,94	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	49.736.052	99,47	100,00
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.818.487.858	9.466.876.106	91,18	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.791.487.858	9.440.009.639	87,48	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.959.336	99,59	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17.000.000	16.907.131	99,45	100,00
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	52.840.000	52.729.000	99,79	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya	52.840.000	52.729.000	99,79	100,00
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.156.102.500	1.154.610.447	99,87	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	308.764.500	307.480.367	99,58	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000	69.997.100	99,99	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	620.338.000	620.244.986	99,99	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	120.000.000	119.887.994	99,91	100,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>665.477.375</b>	<b>664.851.400</b>	<b>99,91</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	665.477.375	664.851.400	99,91	100,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.023.386.603</b>	<b>9.672.600.589</b>	<b>99,50</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.620.000	206.159.323	88,25	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.779.770.000	9.456.441.246	96,69	97,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>505.361.160</b>	<b>497.786.237</b>	<b>98,50</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244.615.460	243.959.772	99,73	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	210.745.700	203.826.465	96,72	100,00
2.	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>986.000.000</b>	<b>1.017.368.278</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>572.000.000</b>	<b>796.985.478</b>	<b>98,61</b>	<b>100,00</b>
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	90.000.000	92.666.400	99,64	100,00
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	54.000.000	53.835.800	99,70	100,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	93.000.000	92.946.037	99,94	100,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	220.000.000	213.285.980	96,95	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000	99.447.100	99,45	100,00
	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.000.000	11.848.500	98,74	100,00
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>238.000.000</b>	<b>230.880.200</b>	<b>98,65</b>	<b>100,00</b>
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	142.000.000	84.175.100	99,03	100,00
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	50.000.000	47.900.850	96,77	100,00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	46.000.000	83.963.000	99,36	100,00
	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>176.000.000</b>	<b>174.781.948</b>	<b>99,31</b>	<b>100,00</b>
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	130.000.000	129.740.358	99,80	100,00
	Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	46.000.000	45.041.590	97,92	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.466.862.497</b>	<b>22.737.494.562</b>	<b>92,93</b>	<b>100,00</b>

Secara keseluruhan, target pelaksanaan Renja Tahun 2023 khususnya yang bersumber dari dana APBD untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat tercapai, dan dapat diketahui dari pencapaian Prosentase Penyerapan Anggaran sebesar **92,93%** (Sembilan puluh dua koma sembilan puluh tiga persen) dan Prosentase fisik mencapai **100,00 %** (Seratus persen).

Sehingga beberapa kegiatan terdapat sisa anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.713.060.250,-** (Satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau **7,30 %** (tujuh koma tiga puluh persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 858.513,-** (Delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) atau **0,33 %** (nol koma tiga puluh tiga persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.351.611.752,-** (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh lima dua rupiah) atau **12,49 %** (dua belas koma empat puluh sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 111.000,-** (Seratus sebelas ribu rupiah) atau **0,21 %** (nol koma dua upulh satu persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.492.053,-** (Satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) atau **0,13 %** (nol koma tiga belas persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 625.975,-** (Enam ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau **0,09 %** (nol koma nol sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 350.786.034,-** (Tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) atau **3,50%** (tiga koma lima puluh persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 7.574.923,-** (Tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) atau **1,50 %** (satu koma lima puluh persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 16.307.685,-** (Enam belas juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau **1,65 %** (satu koma enam puluh lima persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 7.970.183,-** (Tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu serratus delapan puluh tiga rupiah) atau **1,39 %** (satu koma tiga puluh sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 7.119.450,-** (Tujuh juta seratus sembilan

- belas ribu delapan ratus rupiah) atau **2,99 %** (dua koma sembilan puluh sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.218.052,-** (Satu juta dua ratus delapan belas ribu lima puluh dua rupiah) atau **0,69 %** (nol koma enam puluh sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang semaksimal mungkin sesuai dengan pagu anggaran yang sudah tersedia.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023  
Provinsi Kalimantan Tengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Tingkat Realisasi (%)		
1	1.05	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<i>Percentase keterlaksanaan</i>	100%	-					9
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Percentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu</i>	100%	-					11=(10/4)
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	40
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40

*Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Tingkat Realisasi (%)		
1	1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1 dokumen	1 dokumen	5	8=(7/6) 11=10/4
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen/ laporan	12 dokumen 40
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen/ laporan	2 dokumen 40
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%						
1.05.01.1.02.01	Koordinasi dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	400 orang	160 orang	80 orang	76 orang	95	80 orang	240 orang 60
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan 40
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	10	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen (laporan)	4 dokumen (laporan) 40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023		Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>							
1.05.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	2 dokumen	40
1.05.01.1.05	<b>Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase layanan administrasi kepegawaiinan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	-						
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	400 paket	-	80 paket	80 paket	100	80 paket	80 paket	
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pelatihan	250 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100	-	100 orang	40
1.05.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100	-	100 orang	40
1.05.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan</b>	<b>100%</b>							
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis (paket)	10 jenis (paket)	40	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 jenis	12 jenis	40	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	35 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	14 jenis	40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan sid Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2023		Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. sid Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja 2023	Realisasi Renja PD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)
1.05.01.1.06.06	Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	yang Disediakan Bacaan koran bagi pegawai	15 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	6 jenis
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100	20 jenis	40
1.05.01.1.06.09	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%						40
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 surat/paket	100 surat/paket	100 surat/paket	100 surat/paket	100	100 surat/paket	40
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 rekening	3 rekening	3 rekening	3 rekening	100	3 rekening	40
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	40
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%						
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa	Perorangan Dinas atau	120 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	40 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024	
								Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	100	3 jenis
1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	100	2 unit
1.05.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan pelayanan ketenteraman, keteribatan masyarakat daerah provinsi	100%	-					
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan keteribatan umum yang ditangani	100%	-					
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteribatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyeleenggaraan Ketenteraman, Keteribatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	70 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	40
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023		Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023			
1	2	Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	Penegakan Perda dan Perkada	5	6	7	8=(7/6)	9
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlingdungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteribatan Umum	Sistem keamanan lingkungan dan deteksi dini kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas dan bencana	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	100	1 dokumen	2 dokumen
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penyuluh, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Keteribatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	70	14	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	20 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	100	4 kegiatan	8 kegiatan
1.05.02.1.01.0019	Penindakkan atas Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan Peraturan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Perindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Keteribatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Perindakan	70	14	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023				Perkiraaan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024			
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022	Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	3	Percentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani	100%	-	7	8=(7/6)	9	11=(10/4)
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	40
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	40
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	70	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	40
1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Percentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani	100%	-						
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyeleenggaraan Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2024
					Target Renja 2023	Realisasi Renja PD 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.02.1.03.02	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatkan Sekretariat Bersama PPNS	Terlaksananya pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatkan Sekretariat Bersama PPNS	70 Kab/Kota	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota
									11=(10/4)
									40

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat disampaikan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kinerja pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain sebagai berikut yaitu :

### 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan, antara lain :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
- 2) Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 4) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- 6) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan Sub Kegiatan :

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- 2) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
  - 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
  - 2) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS.

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

### a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat
3. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Memberikan Pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
5. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
7. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.

### b. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Dalam pelaksanaan Analisa identifikasi lingkungan internal dan Analisa identifikasi lingkungan Eksternal pada Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan S W O T, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat KEKUATAN (Strength) dan KELEMAHAN (Weakness) yang akan dilakukan, apa yang menjadi PELUANG (OPPORTUNITIES) dan TANTANGAN (THREATS) Dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal.

- a) Kekuatan (Strength)
  - 1) Dasar Hukum Keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 2) Komitmen Masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Publik ;

- 3) Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi, Kabupaten, Kota se - Kalimantan Tengah ;
  - 4) Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai ;
  - 5) Terjalinnya kondisi dan hubungan kemitraan dengan POLRI, Kabupaten/Kota, Kiai, Ulama dan Tokoh Masyarakat se-Kalimantan Tengah ;
  - 6) Terjalinnya kerja sama dengan Aparatur Keamanan (POLRI) dan instansi terkait untuk terciptanya situasi Kalimantan Tengah yang kondusif ;
  - 7) Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat Kalimantan Tengah.
- b) Kelemahan (Weakness).
- 1) Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah/ Protap Tentang Polisi Pamong Praja ;
  - 2) Belum mantapnya materi (Silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja ;
  - 3) Belum Optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Operasional lapangan Trantibum ;
  - 4) Belum Optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap Tugas ;
  - 5) Anggota Polisi Pamong Praja masih ada yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS dan DIKLAT Polisi Pamong Praja;
  - 6) Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja di lapangan yang masih belum sesuai dengan Prosedur tetap (PROTAP) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP) ;
  - 7) Kurangnya kerjasama sosial dan meningkatnya penduduk miskin.
  - 8) Padatnya jumlah penduduk dan penyerapan angkatan kerja yang kurang di Kalimantan Tengah.

## 2. Lingkungan Eksternal

### a. Peluang (Opportunities)

- 1) Meningkatnya tingkat pendidikan ;
- 2) Mantapnya kerukunan warga masyarakat ;
- 3) Kehidupan Masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan tenteram ;

- 4) Adanya semangat reformasi dan paradigma baru ;
- 5) Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat ;
- 6) Tumbuh kesempatan yang luas untuk berprasangka mengambil keputusan ;
- 7) Terjadinya hubungan dengan aparatur POLRI (Eksekutif dan Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Pengaruh Negatif dengan adanya persaingan Era Globalisasi ;
- 2) Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) ;
- 3) Tuntutan Kualitas dan Kuantitas pelayanan Publik ;
- 4) Kontrol sosial semakin meningkat ;
- 5) Lemahnya Koordinasi ;
- 6) Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana hasil pembangunan yang merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan ;
- 7) Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat ;
- 8) Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam penerimaan tenaga kerja ;
- 9) Terputusnya sektor usaha perdagangan dan pabrik-pabrik pada kota / lokasi tertentu ;
- 10) Krisis ekonomi multi dimensi yang belum juga pulih sehingga dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat.

c. Analisis Strategis dan Pilihan

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dari analisa identifikasi lingkungan eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan Asumsi Analisa SWOT sebagai berikut :

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Perlu adanya penyamaan persepsi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.
3. Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesional.
4. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara Pemerintahan.

5. Perlu tersedianya anggaran dan sarana prasarana kerja yang cukup.
6. Perlu peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi Program penanganannya.
7. Perlu penataan kewenangan penanganan trantibum dan penegakan Perda.

Dengan demikian maka, lingkungan strategis tersebut, sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatannya sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatkan dengan kondisi ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Tengah yang kondusif dengan mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

**d. Dampak Terhadap Visi dan Misi Pembangunan Provinsi**

Menyebabkan target yang ingin di capai dalam jangka waktu tertentu, tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini dapat diukur dengan capaian target SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

**e. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat mencapai hasil yang optimal sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung serta penunjang diantaranya adalah sebagai berikut :

**1. Faktor Sarana dan Prasarana Operasional di lapangan**

Faktor sarana dan prasarana pendukung operasional di lapangan mempunyai peranan yang cukup penting serta signifikan dalam upaya pencapaian hasil yang lebih optimal, disamping itu dengan terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan operasional di lapangan akan memberikan semangat lebih serta etos kerja yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sarana dan Prasarana dimaksud diatas meliputi :

- a) Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2.
  - b) Perlengkapan Personil yang memadai dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur tetap (Protap) Satuan Polisi Pamong Praja.
  - c) Pemberian Insentif yang memadai sesuai dengan unsur resiko yang dibebankan kepada personil Satpol PP.
2. Pembiayaan yang bersumber dari dana APBD perlu ditingkatkan sehingga bisa melaksanakan keseluruhan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja melalui berbagai program dan kegiatan yang selama ini belum dilaksanakan agar lebih mendekati kebutuhan ideal dari perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Peningkatan kapasitas serta kuantitas dari personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ideal untuk lingkup Provinsi sebagai rujukan untuk Satpol PP Kota Palangka Raya mempunyai jumlah personil Satpol PP sebanyak 197 orang, sedangkan kondisi saat ini untuk Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan memiliki anggota berjumlah 348 terdiri dari PNS 76 Orang dan Tenaga Kontrak 272 Orang personil Satpol PP.
4. Lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 adalah:

- Jumlah Program : 2 program.
- Jumlah Kegiatan : 10 kegiatan.
- Jumlah Sub Kegiatan : 36 sub kegiatan.
- Pagu indikatif : Rp. 26.794.560.795,-.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah Cakupan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi dengan target capaian tahun 2025 sebesar 100 %.

Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan aspek indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani, target capaian 100 %.
2. Persentase Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani, target capaian 100 %.

Pagu Indikatif rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2025 OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 14.891.213.459,- untuk kegiatan rutin (termasuk gaji Tenaga Kontrak), ditambah untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 11.903.347.336,- sehingga total Pagu Indikatif rancangan akhir RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 26.794.560.795,-. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Untuk Pemerintahan Wajib Yang Berbasarkan Dengan Pelayanan Daerah					Untuk Pemerintahan Wajib Yang Berdasarkan Dengan Pelayanan Daerah					
	Untuk Pemerintahan yang Didasarkan Keterbantuan dan Kelembaban Umum serta Pelayanan Masyarakat					24.629.615.460 Keterbantuan dan Kelembaban Umum serta Pelayanan Masyarakat				26.070.629.533	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterkaitan	100	23.623.615.460	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterkaitan	100	Presentase Keterkaitan	100	21.720.829.533	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang tepat waktu	100	294.450.901	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang tepat waktu	100	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang tepat waktu	100	239.450.001	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	40.823.901	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kota p.Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	40.823.901	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SkPD	Jumlah Dokumen RKA-SkPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SkPD	1 dokumen	20.020.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SkPD	Kota p.Raya	Jumlah Dokumen RKA-SkPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SkPD	1 dokumen	20.020.900		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penilaian RKA-SkPD	Jumlah Dokumen Penilaian RKA-SkPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SkPD	1 dokumen	15.125.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penilaian RKA-SkPD	Kota p.Raya	Jumlah Dokumen Penilaian RKA-SkPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SkPD	1 dokumen	15.125.000		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SkPD	Jumlah Dokumen DPA-SkPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SkPD	1 dokumen	20.020.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SkPD	Kota p.Raya	Jumlah Dokumen DPA-SkPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SkPD	1 dokumen	20.020.900		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SkPD	Jumlah Dokumen DPA-SkPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SkPD	1 dokumen	18.837.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SkPD	Kota p.Raya	Jumlah Dokumen Penilaian Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Penilaian DPA-SkPD	1 dokumen	18.837.900		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SkPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SkPD	6 dokumen	39.940.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SkPD	Kota p.Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SkPD	6 dokumen	39.940.900		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	Catatan Penitling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Laporan hasil Peleksanan Fasilitas, Peleksanan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Kehutanan dan Konservasi Umum (2023-2025) Misсионер, penelitian dan pelaporan mulangah yang tepat waktu	1 dokumen	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Hasil Peleksanan Fasilitas, Peleksanan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kehutanan dan Konservasi Umum (2023-2025) penelitian pelaporan mulangah yang tepat waktu	1 dokumen	85.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang	11.050.267	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang	11.150.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kehutanan Bantuan Tindaklanjut Semesteran SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Kehutanan Semesteran SKPD dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Kehutanan	2 dokumen	17.020.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kehutanan Bantuan Tindaklanjut Semesteran SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Kehutanan Bantuan Tindaklanjut Semesteran SKPD dan Laporan Kehutanan	2 dokumen	20.000.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Terdakwaanya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	52.846.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Terdakwaanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	150.000.000		
Pengadaan Peralatan Dinas Berdasarkan Kelebihan Kapasitas	Kota P.Raya	Jumlah Peralatan Dinas Berdasarkan Kelebihan Kapasitas	80 set	52.640.000	Pengadaan Peralatan Dinas Berdasarkan Kelebihan Kapasitas	Kota P.Raya	Jumlah Peralatan Dinas Berdasarkan Kelebihan Kapasitas	80 set	150.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Penerente layanan administrasi umum perangkat daerah yang dibutuhkan	100	924.458.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Penerente layanan administrasi umum perangkat daerah yang dibutuhkan	100	1.180.000.000		
Penyediaan Kamar Mandi Instansi, Lainnya Penerangan Bangunan Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Peralatan Komponen Instansi Lainnya Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 jenis	7.030.000	Penyediaan Komponen Instansi Lainnya Penerangan Bangunan Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Peralatan Komponen Instansi Lainnya Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 jenis	10.000.000		
Penyediaan Perizinan dan Perengaman Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Peralatan Perizinan dan Perengaman Kantor yang Disediakan	6 jenis	275.621.500	Penyediaan Perizinan dan Perengaman Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Peralatan Perizinan dan Perengaman Kantor yang Disediakan	6 jenis	300.000.000		
Pengabdian	Kota P.Raya	Jumlah Bantuan Fisikasi Kajungan	7 jenis	70.096.000	Penyediaan Bantuan Fisikasi Kajungan dan Pengabdian	Kota P.Raya	Jumlah Bantuan Fisikasi Kajungan dan Pengabdian	7 jenis	70.000.000		
Fasilitasi Kajungan Tamu	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kajungan	1 dokumen	30.000.000	Fasilitasi Kajungan Tamu	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kajungan	1 dokumen	30.000.000		
Perbaikan dan Pengembangan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Penyelegaranan Konsultasi SKPD	1 dokumen	422.338.000	Perbaikan dan Pengembangan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Penyelegaranan Konsultasi SKPD	1 dokumen	650.000.000		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	Catatan Penting		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
1.1	Dukungan Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota p. Raya	Jumlah Dokumen Dikungsi Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	120.000.000	Dukungan Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota p. Raya	Jumlah Dokumen Dikungsi Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	120.000.000			
1.2	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota p. Raya	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	670.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota p. Raya	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	670.000.000			
1.3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kota p. Raya	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional 2024	1 unit	670.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kota p. Raya	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional 2024	1 unit	670.000.000			
1.4	Penyediakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dan Daerah	Kota p. Raya	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	10.208.849.532	Penyediakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota p. Raya	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	10.421.179.512			
1.5	Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	Kota p. Raya	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Sosial Masyarakat	1 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Sosial	Kota p. Raya	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Sosial Masyarakat	1 laporan	6.000.000			
1.6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota p. Raya	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diselaksikan	3 laporan	416.179.532	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota p. Raya	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diselaksikan	3 laporan	415.179.512			
1.7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota p. Raya	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pelayanan	3 laporan	9.783.670.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota p. Raya	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pelayanan	3 laporan	10.000.000.000			
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota p. Raya	Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	100	595.361.160	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota p. Raya	Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	100	590.300.000			
1.9	Penetapan dan Penerbitan Peraturan, Sistem dan Penetapan, Pajak dan Penitipan Kendaraan Dinas Operasional atau Lepasang	Kota p. Raya	Jumlah Kependidikan Penerangan Dinas atau kendaraan Dinas atau Lepasang yang Operasional dan Dikendalikan Pajaknya	24 unit	244.615.460	Penetapan dan Penerbitan, Sistem dan Penetapan, Pajak dan Penitipan Kendaraan Dinas Operasional atau Lepasang	Kota p. Raya	Jumlah Kependidikan Penerangan Dinas atau kendaraan Dinas Jadi penitipan yang Dikendalikan dan Dikendalikan Pajaknya	24 unit	250.000.000			
1.10	Penetapan Peraturan dan Peraturan Restrukturis Sistem dan Peraturan Penerbitan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota p. Raya	Jumlah Peraturan dan Peraturan yang Dipelihara	5 jenis	50.000.000	Pemeliharaan Peraturan dan Peraturan Restrukturis Sistem dan Peraturan Penerbitan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota p. Raya	Jumlah Peraturan dan Peraturan yang Dipelihara	5 jenis	50.000.000			
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERIBATAN UMUM</b>	Kota p. Raya	Jumlah Surat dan Peraturan Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang Operasional Dikendalikan	210.745.700	Pemeliharaan Peraturan dan Peraturan Penerbitan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota p. Raya	Jumlah Surat dan Peraturan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikendalikan	5 gedung	250.000.000				
2.1	<b>2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERIBATAN UMUM</b>	Kota p. Raya	Cakupan pelajaran ketenteraman, ketenteraan seumur dan parintungan masa sekarang Daerah Provinsi	100	846.000.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERIBATAN UMUM</b>	Kota p. Raya	Cakupan pelajaran ketenteraman, ketenteraan seumur dan parintungan masa sekarang Daerah Provinsi	100	2.359.000.000			
2.2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota p. Raya	Penanganan gangguan ketenteraman, ketenteraan dan ketenteraan umum yang dilanggar	100	572.000.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota p. Raya	Penanganan Gangguan ketenteraman, ketenteraan dan ketenteraan umum yang dilanggar	100	1.460.000.000			

Rancangan Awal RKPJ							Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaihan (5)	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (6)	Lokasi (7)	Indikator Kinerja (8)	Target capaihan (10)	Kebutuhan dana (Rp. 000)	Catatan Penting (11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Sumber Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota P. Raya Jumlah Dokumen Dukungan Berbasis Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Sipid)	1.000 Jumlah Dokumen Dukungan Berbasis Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Sipid)	1.000	120.000.000	Dukungan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Sipid	Kota P. Raya Jumlah Dokumen Dukungan Berbasis Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Sipid)	Kota P. Raya Jumlah Dokumen Dukungan Berbasis Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Sipid)	1.000	120.000.000	1.000	1.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota P. Raya Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional 2024/2025	100	670.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota P. Raya Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional 2024/2025	Kota P. Raya Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional 2024/2025	Kota P. Raya Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional 2024/2025	100	670.000.000	670.000.000	670.000.000
Penyediaan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	100	10.268.449.532	Penyediaan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	100	10.421.179.532	10.421.179.532	10.421.179.532
Penyediaan Jasa Sosial	Kota P. Raya Surat Menyurat	1.000	10.000.000	Penyediaan Jasa Sosial	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota P. Raya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.000	415.179.532	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3.000	415.179.532	415.179.532	415.179.532
Penyediaan Jasa Pengelolaan Urum Kantor	Kota P. Raya Penyediaan	3.000	9.783.673.000	Penyediaan Jasa Pengelolaan Urum Kantor	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota P. Raya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Milik Daerah	Kota P. Raya Jumlah Kependidikan Peningkatan Kendaraan Dinas Jadian yang Dipelihara dan Dikembangkan	100	589.161.160	Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Milik Daerah	Kota P. Raya Jumlah Kependidikan Peningkatan Kendaraan Dinas Operasional 2024/2025	Kota P. Raya Jumlah Kependidikan Peningkatan Kendaraan Dinas Operasional 2024/2025	Kota P. Raya Jumlah Kependidikan Peningkatan Kendaraan Dinas Operasional 2024/2025	100	550.000.000	550.000.000	550.000.000
Penyediaan Jasa Peningkatan, Pengelolaan Pemeliharaan, Pusat dan Penitunan Kendaraan Dinas Operasional 2024/2025	Kota P. Raya Jumlah Kendaraan Peningkatan Dinas statau Kendaraan Dinas Jadian yang Dipelihara dan Dikembangkan	24 unit	244.615.460	Penyediaan Jasa Peningkatan, Pengelolaan Pemeliharaan, Pusat dan Penitunan Kendaraan Dinas Operasional 2024/2025	Kota P. Raya Jumlah Kendaraan Peningkatan Dinas statau Kendaraan Dinas Jadian yang Dipelihara dan Dikembangkan	Kota P. Raya Jumlah Kendaraan Peningkatan Dinas statau Kendaraan Dinas Jadian yang Dipelihara dan Dikembangkan	Kota P. Raya Jumlah Kendaraan Peningkatan Dinas statau Kendaraan Dinas Jadian yang Dipelihara dan Dikembangkan	24 unit	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Lainnya	Kota P. Raya Jumlah Peningkatan dan Pembangunan Lainnya	3 jenis	50.000.000	Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Lainnya	Kota P. Raya Jumlah Peningkatan dan Pembangunan Lainnya	Kota P. Raya Jumlah Peningkatan dan Pembangunan Lainnya	Kota P. Raya Jumlah Peningkatan dan Pembangunan Lainnya	3 jenis	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERBUKAN (URUM)	Kota P. Raya Jumlah Survei dan Pusuruan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Dikembangkan	6 gedung	210.745.700	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERBUKAN SUMUR	Kota P. Raya Jumlah Survei dan Pusuruan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota P. Raya Jumlah Survei dan Pusuruan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota P. Raya Jumlah Survei dan Pusuruan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 gedung	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Penanggahan Gangguan Ketenteraman dan Keterbukaan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota P. Raya Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Keterbukaan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	989.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERBUKAN SUMUR	Kota P. Raya Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Keterbukaan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota P. Raya Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Keterbukaan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota P. Raya Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Keterbukaan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000
										1.400.000.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPjD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaihan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaihan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penanganan atas Pengeluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan hasil Penanganan Pengeluhan atas Pengeluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 laporan	46.000.000	Penganggaran Jatis Pengeluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan hasil Penanganan Pengeluhan atas Pengeluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 laporan	250.000.000		
Pembinaan Perwil dan Pagedari Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina	100	176.000.000	Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina	100	300.000.000		
Pengembangan Kipostis dan Kinerja PPNS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan hasil Penanganan Pengeluhan Kipostis Pegawai PPNS dalam Mewujudkan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi dan Keterbukaan MDSPPNS serta Pengeluhan Perdis	1 laporan	130.000.000	Pengembangan Kipostis dan Kinerja PPNS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan hasil Penanganan Pengeluhan Kipostis Pegawai PPNS dalam Mewujudkan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi dan Keterbukaan MDSPPNS serta Pengeluhan Perdis	1 laporan	150.000.000		
Pembentukan Administrasi Perkantoran dan PPNS Relegasi Peraturan Daerah, Dikungsi, pekatanan Suatu Dilempat, Pengutusan, Sekejut dan Bersama PPNS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Penyebarluasan hasil Penanganan atas Pengeluhan Perdis, Jumlah Perkuasa yang Dapat Didengarkan di Tempat dan Sekejut dan spnns di Setiap pp Secara Operasional	20 dokumen	46.000.000	Pembentukan Administrasi Perkantoran dan PPNS Pengutusan Peraturan Daerah, Dikungsi, pekatanan Suatu Dilempat, Pengutusan, Sekejut dan Bersama PPNS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Penyebarluasan hasil Penanganan atas Pengeluhan Perdis, Jumlah Perkuasa yang Dapat Didengarkan di Tempat dan Sekejut dan spnns di Setiap pp Secara Operasional	20 dokumen	150.000.000		

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada prinsipnya rancangan Rencana Kerja yang dibuat tetap mengacu pada Program dan Kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan, kepentingan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk program antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- 2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat (Musrenbang, pokir dan usulan tokoh masyarakat).

**Table 2.5**

### Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana strategik daerah Kabupaten/Kota secara jelas belum tentu mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi, hal ini mengingat adanya perbedaan tingkat prioritas pembangunan daerah masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki kaitan tugas dan fungsi yang baik, namun program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki kesamaan program dan kegiatan yang sifatnya berjenjang baik dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Secara hirarki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi yang memerlukan dukungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu penerapan pelayanan publik di daerah, penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.

#### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dan Sasaran ini dibuat lebih riil dari misi dan diharapkan dapat menjadi pedoman melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yaitu :

**a. Tujuan**

Tujuan yang ingin diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja Agar Lebih Efektif, Handal, Tangguh dan Profesional.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
5. Meningkatkan Kualitas Anggota Satlinmas Dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu /Pilkada dan Perlindungan Masyarakat.
6. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang Memadai Guna Menunjang Kelancaran Tugas.

**b. Sasaran**

Adapun sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tujuan dimaksud adalah:

- 1) Meningkatnya pendapatan asli daerah melalui penegakan Perda dan Perkada.
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja.
- 3) Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 4) Terlaksananya Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 5) Meningkatnya kualitas Anggota Satlinmas dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, dan Perlindungan Masyarakat.
- 6) Siapnya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran tugas.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Langsung, yaitu Belanja Operasi (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa), dan Belanja Modal (Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 bersumber dari dana APBD Provinsi. Program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi terdiri atas 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 26.794.560.795,- (Dua puluh enam miliar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah).

<b>A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
	a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
	b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan.</li> <li>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</li> <li>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>
<b>B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
<b>8.</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.</li> <li>b. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</li> <li>c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.</li> <li>d. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.</li> <li>e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia.</li> <li>f. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.</li> <li>b. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.</li> <li>c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.</li> </ul>
<b>10.</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</li> <li>b. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS</li> </ul>

Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 akan disajikan pada Tabel 3.3 dibawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2025**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**  
**( Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 )**

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat					26.794.560.795			27.842.500.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan		100	25.104.462.671	APBD	100	25.342.500.000	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu		100	290.000.000	APBD	100	290.000.000	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	2 dokumen	45.000.000	APBD	2 dokumen	45.000.000	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD	1 dokumen	15.000.000	
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD	1 dokumen	15.000.000	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD	1 dokumen	15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Fasilit Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD	1 dokumen	15.000.000	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raya	6 dokumen	85.000.000	APBD	6 dokumen	85.000.000	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Kelembutan Ummum dan Perlindungan Masyarakat	Kota P.Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD	1 dokumen	100.000.000	
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu</b>		<b>100</b>	<b>11.938.347.336</b>	<b>APBD</b>	<b>100</b>	<b>11.185.000.000</b>	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raya	72 orang	11.903.347.336	APBD	72 orang	11.150.000.000	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD	1 dokumen	15.000.000	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota P.Raya	2 dokumen	20.000.000	APBD	2 dokumen	20.000.000	
<b>1.05.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>		<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>100</b>	<b>20.000.000</b>	
1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota P.Raya	1 laporan	15.000.000	APBD	1 laporan	20.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraaan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.05.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah</b>	<b>Teriksannya administrasi kepegawaiian perangkat daerah</b>		100	312.500.000	APBD		100	327.500.000
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota P.Raya	275 stel	302.500.000	APBD		275 stel	302.500.000
1.05.01.1.05.0003	Pendaftaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian	Jumlah Dokumen Pendaftaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
<b>1.05.1.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan</b>		100	1.851.67.581	APBD		100	1.985.000.000
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	5 jenis	65.000.000	APBD		5 jenis	65.000.000
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	6 jenis	646.732.246	APBD		6 jenis	700.000.000
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota P.Raya	7 jenis	70.000.000	APBD		7 jenis	75.000.000
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota P.Raya	2 dokumen	100.000.000	APBD		2 dokumen	100.000.000
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota P.Raya	1 dokumen	75.000.000	APBD		1 dokumen	75.000.000
1.05.01.1.06.0009	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	1 dokumen	774.945.335	APBD		1 dokumen	850.000.000
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	120.000.000	APBD		1 dokumen	120.000.000
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		100	9.656.937.754	APBD		100	10.285.000.000
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraaan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota P.Raya	3 laporan	230.000.000	APBD		3 laporan	265.000.000
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota P.Raya	3 laporan	9.416.937.754	APBD		3 laporan	10.000.000.000
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>		100	<b>1.040.000.000</b>	APBD		100	<b>1.250.000.000</b>
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkannya Pajaknya	Kota P.Raya	24 unit	500.000.000	APBD		24 unit	600.000.000
1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota P.Raya	5 jenis	125.000.000	APBD		5 jenis	150.000.000
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota P.Raya	5 gedung	415.000.000	APBD		5 gedung	500.000.000
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi</b>		100	<b>1.690.096.124</b>	APBD		100	<b>2.500.000.000</b>
<b>1.05.02.1.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani</b>		100	<b>1.145.096.124</b>	APBD		100	<b>1.750.000.000</b>
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	250.000.000
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlajani	Kota P.Raya	1 laporan	76.000.000	APBD		1 laporan	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraaan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteribatan Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteribatan Umum	Kota P.Raya	1 dokumen	400.000.000	APBD		1 dokumen	400.000.000
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Panyulahan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalian	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Panyulahan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalian	Provinsi Kalteng	35 kasus	159.098.124	APBD		35 kasus	300.000.000
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Pamong Praja dan Satuan Perindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota P.Raya	100 orang	250.000.000	APBD		100 orang	350.000.000
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penetapan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Provinsi Kalteng	35 kasus	160.000.000	APBD		35 kasus	250.000.000
<b>1.05.02.1.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Percentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani</b>		<b>100</b>	<b>322.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>450.000.000</b>
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	123.300.000	APBD		1 laporan	150.000.000
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	99.350.000	APBD		1 laporan	150.000.000
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Provinsi Kalteng	1 laporan	99.350.000	APBD		1 laporan	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Perkiraaan Maju 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Percentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina		100	223.000.000	APBD		100	300.000.000
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketereman Masyarakat serta Penegakan Perda	Provinsi Kalteng	1 laporan	155.000.000	APBD		1 laporan	200.000.000
1.05.02.1.03.0002	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Provinsi Kalteng	1 laporan	68.000.000	APBD		1 laporan	100.000.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama yang berangkat pada output,

outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

### KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan pengurangan Kemiskinan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Persentase (%)

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Perkiraaan Maju 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Keteriteraman dan Keteributan Umum Serta Perlindungan Masyarakat				26.794.560.795				27.842.500.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100	25.104.462.671	APBD		100	25.342.500.000	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100	290.000.000	APBD		100	290.000.000	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	2 dokumen	45.000.000	APBD	2 dokumen	45.000.000	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD	1 dokumen	15.000.000	
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD	1 dokumen	15.000.000	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD	1 dokumen	15.000.000	
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD	1 dokumen	15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraaan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raya	6 dokumen	85.000.000	APBD	6 dokumen	85.000.000	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterbukaan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota P.Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD	1 dokumen	100.000.000	
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu</b>		<b>100</b>	<b>11.938.347.336</b>	<b>APBD</b>	<b>100</b>	<b>11.185.000.000</b>	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raya	72 orang	11.903.347.336	APBD	72 orang	11.150.000.000	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15.000.000	APBD	1 dokumen	15.000.000	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota P.Raya	2 dokumen	20.000.000	APBD	2 dokumen	20.000.000	
<b>1.05.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>		<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>100</b>	<b>20.000.000</b>	
1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota P.Raya	1 laporan	15.000.000	APBD	1 laporan	20.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraaan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.05.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi kepegawaihan perangkat daerah		100	312.500.000	APBD		100	327.500.000
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelingkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelingkapannya	Kota P.Raya	275 stel	302.500.000	APBD		275 stel	302.500.000
1.05.01.1.05.0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaihan	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaihan	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
<b>1.05.1.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan</b>		100	1.851.677.581	APBD		100	1.985.000.000
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	5 jenis	65.000.000	APBD		5 jenis	65.000.000
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	6 jenis	646.732.246	APBD		6 jenis	700.000.000
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota P.Raya	7 jenis	70.000.000	APBD		7 jenis	75.000.000
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota P.Raya	2 dokumen	100.000.000	APBD		2 dokumen	100.000.000
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota P.Raya	1 dokumen	75.000.000	APBD		1 dokumen	75.000.000
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	774.945.335	APBD		1 dokumen	850.000.000
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	120.000.000	APBD		1 dokumen	120.000.000
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		100	9.656.937.754	APBD		100	10.285.000.000
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraaan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota P.Raya	3 laporan	230.000.000	APBD		3 laporan	265.000.000
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota P.Raya	3 laporan	9.416.937.754	APBD		3 laporan	10.000.000.000
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang diperlihara</b>		100	1.040.000.000	APBD		100	1.250.000.000
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota P.Raya	24 unit	500.000.000	APBD		24 unit	600.000.000
1.05.01.1.09.0007	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota P.Raya	5 jenis	125.000.000	APBD		5 jenis	150.000.000
1.05.01.1.09.0010	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota P.Raya	5 gedung	415.000.000	APBD		5 gedung	500.000.000
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi</b>		100	1.690.098.124	APBD		100	2.500.000.000
<b>1.05.02.1.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteribatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani</b>		100	1.145.098.124	APBD		100	1.750.000.000
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteribatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteribatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	250.000.000
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Terlajani	Kota P.Raya	1 laporan	76.000.000	APBD		1 laporan	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraaan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perfindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perfindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteriban Umum	Kota P.Raya	1 dokumen	400.000.000	APBD	1 dokumen	400.000.000	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Provinsi Kalteng	35 kasus	159.098.124	APBD	35 kasus	300.000.000	
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perfindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuara Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perfindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota P.Raya	100 orang	250.000.000	APBD	100 orang	350.000.000	
1.05.02.1.01.0019	Penindakatan atas Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakkan	Provinsi Kalteng	35 kasus	160.000.000	APBD	35 kasus	250.000.000	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan yang ditangani		100	322.000.000	APBD	100	450.000.000	
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	123.300.000	APBD	1 laporan	150.000.000	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	99.350.000	APBD	1 laporan	150.000.000	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Provinsi Kalteng	1 laporan	99.350.000	APBD	1 laporan	150.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Perkiraaan Maju 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina		100	223.000.000	APBD		100	300.000.000
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelejenggaraan Keteribatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pengakuan Perda	Provinsi Kalimantan	1 laporan	155.000.000	APBD		1 laporan	200.000.000
1.05.02.1.03.0002	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Provinsi Kalimantan	1 laporan	68.000.000	APBD		1 laporan	100.000.000

## BAB V

### P E N U T U P

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2025. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini diharapkan ke depan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Palangka Raya, 4 Juli 2024

